

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**” (Survei pada Pemerintah Provinsi, Kota & Kabupaten Di Kalimantan Barat Tahun 2021).

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, arahan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis yang tercinta dan tersayang Ibunda Lia Kastuti, SE. dan Ayahanda Rahmadi, SE., M.M., Ak., CA., CSFA. yang selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat, kasih sayang, perhatian, dan selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya.
2. Adik tercinta Muhammad Ade Alvien Liandi dan Maharani Putri Vieralia yang selalu memberikan doa, dorongan serta semangat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Nundang Busaeri, Ir., M.T. selaku Rektor Universitas Siliwangi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

5. Ibu R. Neneng Rina Andriani, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis.
6. Bapak H. Tedi Rustendi, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing I sekaligus Dosen Wali Akuntansi D 2017 yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis.
7. Ibu Euis Rosidah, S.E., M.Ak. selaku dosen penguji I yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis.
8. Bapak Rani Rahman, S.E., M.Ak. selaku dosen penguji II yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta membantu penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak Rahmadi, SE., M.M., Ak., CA., CSFA. selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Bapak Maksum, S.H., M.H. selaku Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Saudara-saudara penulis Aldy Mohamad Ramdani, Dwiki Darmawan, Iqbal Nur Fajar, Novan Nuraziz dan Ryan Candra Agustin yang selalu

memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa dalam proses penyusunan usulan penelitian ini.

13. Sahabat semasa kecil Aditya Putra Ramadhan, Ardha Dissa Avianza, Bagas Arya Prayoga, Fraghian Aldy Prasangga, Frathio Gery Geraldi, Ibrahim Khalid, Kevin Wahyu Nugroho, Langgeng Pambudhy, Kharisma Damar, Muharram Saputra, dan Mohammad Dandy Kurniawan yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa dalam proses penyusunan usulan penelitian ini.

14. Sahabat semasa SMA yaitu Adhitya Putra Hilmadiansyah, Alif Prasetya, Aziz Ritoa, Daffa Rizky Deovalent, Daniel Gerald Yohannes, Dicky Muhammad, Eliezer Karnaim Tuahta, Farhan Naufal, Forry Fortuna Simbolon, Raka Putra Eshardiansyah, Rangga Chigra Pramudya Santoso, Sefranhel Friezqi dan Wahyu Mulyadi.

15. Sahabat semasa Kuliah yaitu MZ Adnan Fairuza, Muhammad Nur Syahdilar, Muhammad Septian Reynaldi, Novan Muhammad Syaban, dan Rizqi Akbar Maulana.

16. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2017, terutama Akuntansi D 2017 yang selalu mendukung, memberikan semangat dan selalu solid semasa kuliah.

17. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala doa dan dukungannya, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Tasikmalaya, Juni 2022

Nanda Subhan Liandi

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	22
1.3 Tujuan Penelitian .....	23
1.4 Kegunaan Penelitian .....	24
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
1.5.1 Lokasi Penelitian .....	24
1.5.2 Waktu Penelitian .....	25
<b>BAB II</b> .....	<b>26</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>26</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	26
2.1.1 Sistem Pengendalian Internal.....	26
2.1.1.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal.....	26
2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal .....	28

2.1.1.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal.....	28
2.1.1.4 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal.....	32
2.1.2 Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.....	33
2.1.2.1 Definisi Kepatuhan Pada Ketentuan Perundang-undangan..	33
2.1.2.2 Jenis-jenis Temuan Kepatuhan.....	33
2.1.2.3 Peraturan Perundang-undangan yang Digunakan Sebagai Acuan Dalam Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.....	34
2.1.3 Opini BPK Atas LKPD.....	35
2.1.3.1 Definisi Opini Audit.....	35
2.1.3.2 Tujuan Audit Laporan Keuangan .....	35
2.1.3.3 Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	36
2.1.3.4 Jenis-jenis Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	37
2.1.3.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	38
2.2 Kerangka Pemikiran.....	40
2.3 Hipotesis .....	45
<b>BAB III .....</b>	<b>46</b>
<b>OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Objek Penelitian.....	46
3.2 Metode Penelitian .....	46
3.2.1 Operasionalisasi Variabel .....	47
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.2.2.1 Jenis Data.....	51
3.2.2.2 Populasi Sasaran.....	52
3.2.2.3 Penentuan Sampel .....	52
3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data .....	53

3.3 Model Penelitian .....	55
3.4 Teknik Analisis Data.....	56
3.4.1 Metode Transformasi Data .....	57
3.4.2 Analisis Deskriptif.....	58
3.4.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	60
3.4.3.1 Uji Validitas Instrumen .....	60
3.4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen.....	62
3.4.4 Analisis Verifikatif .....	62
3.4.5 Uji Asumsi Klasik .....	63
3.4.6 Analisis Regresi Linear Berganda.....	66
3.4.7 Analisis Koefisien Korelasi .....	67
3.4.8 Analisis Koefisien Determinasi .....	69
3.4.9 Menghitung Variabel Epsilon.....	69
3.4.10 Uji Hipotesis.....	69
3.4.10.1 Uji Parsial (Uji t).....	71
3.4.10.2 Uji simultan (Uji F).....	72
3.4.11 Rancangan Kuesioner .....	73
<b>BAB IV.....</b>	<b>74</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	74
4.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	75
4.1.1.1 Uji Validitas .....	76
4.1.1.2 Uji Reliabilitas .....	76
4.1.2 Sistem Pengendalian Internal.....	77
4.1.3 Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.....	99
4.1.3.1 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ..	109
4.2 Pembahasan .....	122

4.2.1 Rekapitulasi Tanggapan Responden Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Opini BPK atas LKPD .....	122
4.2.1.1 Rekapitulasi Tanggapan Responden Untuk Nilai Total Mengenai Sistem Pengendalian Internal .....	122
4.2.1.2 Rekapitulasi Tanggapan Responden Untuk Nilai Total Mengenai Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.....	127
4.2.1.3 Tanggapan Responden Untuk Nilai Total Mengenai Opini BPK Atas LKPD.....	129
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	133
4.2.2.1 Uji Normalitas .....	133
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas .....	133
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	134
4.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Opini BPK Atas LKPD.....	134
4.2.4 Pengaruh Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Opini BPK Atas LKPD .....	136
4.2.5 Pengaruh Secara Simultan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Opini BPK Atas LKPD.....	138
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>141</b>
5.1 Simpulan.....	141
5.2 Saran .....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>143</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>147</b>



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan	Hal.
1.1	Data Opini LKPD Prov. Kalimantan Barat Tahun 2015-2019	4
1.2	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Rencana Penelitian	16
3.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian	48
3.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian	49
3.3	Operasionalisasi Variabel Penelitian	50
3.4	Populasi Penelitian	52
3.5	Ukuran Jawaban Kuesioner	55
3.6	Interpretasi Koefisien Korelasi	68
4.1	Klasifikasi Kriteria Tanggapan Responden	75
4.2	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan atau aturan-aturan tentang pedoman etik secara tertulis terkait perilaku dan pemberian sanksi kepada pegawai yang melakukan kecurangan/ketidakjujuran/ penyimpangan dari peraturan	77
4.3	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah menkomunikasikan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan tersebut kepada seluruh pegawai	78
4.4	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah memiliki unit khusus sebagai penegak aturan perilaku/etika pegawai	78
4.5	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan tertulis/standar kompetensi terkait kualifikasi atau persyaratan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan atau melaksanakan tugas-tugas	79
4.6	Tanggapan mengenai Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui program beasiswa pegawai, diklat-diklat atau kursus-kursus	80

4.7	Tanggapan mengenai Pemerintah Daerah memonitor kepastian pegawai mendapatkan Pendidikan/pelatihan teknis sesuai bidang pekerjaannya	80
4.8	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah menetapkan Struktur Organisasi yang jelas	81
4.9	Tanggapan responden mengenai Struktur organisasi telah menggambarkan tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan wewenang bagi setiap unit kerja	82
4.10	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi periodik dan penyesuaian struktur organisasi terkait perubahan peraturan perundangan dan lingkungan strategis.	82
4.11	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah memiliki standar kompetensi pegawai yang meliputi latar belakang pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan untuk setiap posisi dan jabatan sebagai dasar rekrutmen pegawai baru.	83
4.12	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah mempertimbangkan prestasi kerja, kepangkatan dan senioritas dalam promosi pegawai.	84
4.13	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah menerapkan reward and punishment atas pencapaian kinerja pegawai	84
4.14	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat pembuatan Laporan Keuangan Daerah seperti Penyampaian SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang terlambat.	85
4.15	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah mengantisipasi perubahan peraturan, standar akuntansi yang terkait dengan proses pencatatan dan pelaporan.	86
4.16	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah menyeleksi dan mencoba semua sistem (teknologi informasi) yang dibuat/baru sebelum diterapkan dalam pengolahan data transaksi.	86
4.17	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah memisahkan fungsi dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan transaksi, pencatatan	87

- transaksi, dan penyimpanan asset hasil transaksi yang dilaksanakan oleh orang atau bidang berbeda
- 4.18 Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah memisahkan tugas setiap tahap pelaksanaan suatu transaksi dan pemegang buku besar serta buku pembantu, yaitu dilaksanakan oleh orang yang berbeda. 88
- 4.19 Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah memisahkan tugas antara pihak yang melaksanakan pengadaan barang, memeriksa barang hasil pengadaan, menerima barang hasil pengadaan, dan mengadministrasikan pembukuan barang. 88
- 4.20 Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah melakukan pembatasan akses terhadap orang-orang yang masuk ke ruang penyimpanan dokumen, peralatan pengolahan data, dan penyimpanan aset (seperti komputer pada bagian pembukuan dan gudang persediaan/barang). 89
- 4.21 Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah memiliki tempat penyimpanan dokumen dan peralatan pengolahan data dilengkapi dengan sistem pengamanan yang baik, yaitu terhindar dari bencana banjir atau kebakaran dan akses kunci hanya pada orang-orang tertentu. 90
- 4.22 Tanggapan responden Pemerintah Daerah telah melakukan pembatasan akses /password terhadap orang-orang yang tidak berhak pada peralatan pengolah dan penyimpan data. 91
- 4.23 Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah melakukan analisa penyebab selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja. 91
- 4.24 Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah mereview/melakukan analisa perbandingan antara realisasi belanja/pendapatan tahun berjalan dengan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya. 92
- 4.25 Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah memiliki hasil review/analisa terkait permasalahan/kendala/hambatan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dan rekomendasi tindaklanjutnya. 93

4.26	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah melakukan pencatatan atau jurnal hanya berdasarkan pada bukti-bukti transaksi yang valid dan telah diverifikasi (Asersi Keberadaan dan Keterjadian).	93
4.27	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah mensosialisasikan atas kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan kepada pegawai.	94
4.28	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah memiliki sistem informasi yang terintegrasi yang memungkinkan praktik desentralisasi keuangan dapat termonitor secara terpusat (terintegrasi).	95
4.29	Tanggapan responden mengenai kepala daerah secara berkala mendapat laporan status penyelesaian rekomendasi yang disampaikan auditor internal dan eksternal sehingga pimpinan dapat menyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi.	95
4.30	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti terhadap penyimpangan pelaksanaan dari anggaran.	96
4.31	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah dan DPRD telah memperhatikan dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat terkait isu penyimpangan pengelolaan keuangan negara.	97
4.32	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti setiap rekomendasi untuk perbaikan Struktur Pengendalian Internal yang disampaikan oleh Internal Auditor dan Eksternal Auditor dan dipantau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	97
4.33	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti secara keseluruhan temuan audit (audit finding).	98
4.34	Tanggapan responden mengenai Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan.	99
4.35	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah mengantisipasi adanya belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan.	100
4.36	Tanggapan responden mengenai Pemerintah daerah telah mengantisipasi adanya kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.	100

4.37	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah melakukan pembenahan terhadap pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan.	101
4.38	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah menindaklanjuti adanya kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya.	102
4.39	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah menindaklanjuti adanya pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.	102
4.40	Tanggapan responden mengenai Pemerintah daerah telah mengantisipasi adanya aset dikuasai pihak lain.	103
4.41	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah meminimalisir adanya penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah atau perusahaan milik daerah.	104
4.42	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah mengantisipasi adanya kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.	104
4.43	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah mengantisipasi adanya penerimaan daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak.	105
4.44	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah memperhatikan serta menindaklanjuti pertanggungjawaban yang tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid).	106
4.45	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah memperhatikan dan menindaklanjuti adanya pekerjaan dilaksanakan yang mendahului kontrak atau penetapan anggaran.	106
4.46	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah mengantisipasi adanya kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.	107
4.47	Tanggapan responden mengenai Pemerintah daerah telah mengantisipasi adanya perbuatan curang dalam proses pengadaan barang/jasa.	108

4.48	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah meminimalisir adanya tindakan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara.	108
4.49	Tanggapan responden mengenai pemerintah daerah telah mengantisipasi akan adanya praktik suap menyuap.	109
4.50	Tanggapan responden mengenai laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan SAP, efektivitas SPI, ketidakpatuhan rendah dan pengungkapan transaksi memadai.	110
4.51	Tanggapan responden mengenai laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dengan lengkap sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta konsisten.	111
4.52	Tanggapan responden mengenai Pemerintah daerah telah menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang kuat.	111
4.53	Tanggapan responden mengenai laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material.	112
4.54	Tanggapan responden mengenai auditor tidak menemukan salah saji material saat memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah.	112
4.55	Tanggapan responden mengenai laporan keuangan pemerintah daerah telah diungkapkan secara lengkap, jelas dan memadai serta tidak terdapat ketidakpastian yang luar biasa (material).	113
4.56	Tanggapan responden mengenai Pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian apabila terdapat salah saji material pada beberapa pos laporan keuangan.	114
4.57	Tanggapan responden mengenai Opini wajar dengan pengecualian diberikan auditor jika adanya penyimpangan pada Standar Akuntansi Pemerintahan.	114
4.58	Tanggapan responden mengenai auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dari pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.	115

4.59	Tanggapan responden mengenai auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian atas lkpd jika terdapat temuan kepatuhan yang berindikasi merugikan keuangan daerah.	115
4.60	Tanggapan responden mengenai opini wajar dengan pengecualian diberikan karena auditor tidak dapat memperoleh bukti audit cukup dan tepat karena adanya pembatasan lingkup atas ketidakpatuhan yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan.	116
4.61	Tanggapan responden mengenai opini wajar dengan pengecualian atas lkpd diberikan jika terdapat temuan kepatuhan yang berindikasi merugikan keuangan daerah yang memengaruhi akun lain secara perpasif.	117
4.62	Tanggapan responden mengenai opini tidak wajar yang diberikan oleh auditor disebabkan karena adanya keraguan atas kebenaran laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pemerintah daerah.	118
4.63	Tanggapan responden mengenai opini tidak wajar diberikan bila terdapat kondisi penyimpangan terhadap sap yang sangat material.	118
4.64	Tanggapan responden mengenai opini tidak wajar diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa penyimpangan terhadap prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan bersifat material dan pervasive.	119
4.65	Tanggapan responden mengenai opini tidak memberikan pendapat diberikan bila terdapat temuan kelemahan spi dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat material.	120
4.66	Tanggapan responden mengenai pembatasan lingkup yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.	120
4.67	Tanggapan responden mengenai opini tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion) diberikan saat auditor tidak dapat melaksanakan tugas pemeriksaannya karena adanya pembatasan luar biasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah.	121

## **DAFTAR GAMBAR**

No. Gambar	Keterangan	Hal.
2.1	Kerangka Pemikiran	44
3.1	Hubungan Struktural Antara Variabel X1, X2 dan Y	55



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Keterangan	Hal.
1	Kuesioner	147
2	Waktu Penelitian	155
3	Data Skor Jawaban Responden	156
4	Uji Validitas	159
5	Uji Reliabilitas	161
6	Hasil Uji Data	162
7	Surat Izin Penelitian	170
8	Lembar Pengesahan dan Revisi	171
9	Daftar Riwayat Hidup	176